

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143-152
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Manajemen Islam, Volume 3, No 1. STIE PGRI Dewantara: Jombang.
- Moeleong L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273-288.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015
- Perda Pemalang Nomor 87 Tahun 2018 tentang ADD
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Akuntabilitas*, 10(1), 19-30.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Susliyanti, E. D. (2017). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 20(1), 16-26.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah*. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.